

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbankan Islam merupakan fenomena baru dalam dunia ekonomi modern, kemunculannya seiring dengan upaya gencar yang dilakukan oleh para pakar Islam dalam mendukung ekonomi Islam yang diyakini mampu mengganti dan memperbaiki sistem ekonomi konvensional yang berbasis pada bunga.<sup>1</sup> Keberadaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1993 tentang Bank Indonesia menjadi landasan utama penunjang perbankan Islam di Indonesia saat ini.<sup>2</sup>

Perbankan Islam memiliki kelembagaan yang agak berbeda dengan perbankan konvensional.<sup>3</sup> Bank Islam di Indonesia dapat dibagi kedalam tiga kelompok, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>4</sup>

Bank syariah pada dasarnya bersumber pada konsep uang dalam Islam. Sebab bisnis perbankan tidak dapat lepas dari persoalan uang.<sup>5</sup> Di dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi.<sup>6</sup> Diterimanya peranan uang ini secara meluas dengan maksud melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran dan penghisapan dalam ekonomi tukar-menukar. Maka, motif permintaan terhadap uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi (*money demand for transaction*), bukan untuk spekulasi atau *trading*.<sup>7</sup> Islam tidak mengenal spekulasi (*money demand for speculation*) karena pada hakikatnya uang adalah milik Allah Swt. yang

---

<sup>1</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal.71.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 108.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 163.

<sup>4</sup> *Ibid*.

<sup>5</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP-STIM YKPN; 2011), hal. 19

<sup>6</sup> *Ibid*.

<sup>7</sup> Amir Machmud dan Rukmana, *1 Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga; 2010), hal. 10.

diamanahkan kepada kita untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.<sup>8</sup> Dalam pandangan Islam uang adalah *flow concept* sehingga harus selalu berputar dalam perekonomian agar semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan perekonomian pun akan semakin baik.<sup>9</sup>

Bank syariah pada dasarnya dalam beberapa hal memiliki persamaan dengan Bank Konvensional, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan dan syarat-syarat umum lainnya.<sup>10</sup> Namun Bank syari'ah dalam menjalankan usahanya tidak dapat dipisahkan dari konsep-konsep syariah yang mengatur produk dan operasionalnya.<sup>11</sup> Konsep dasar syari'ah akan dijadikan pijakan dalam mengembangkan produk bank syariah.

Seiring dengan kemajuan perekonomian telah mendorong secara otomatis perkembangan teknologi yang semakin pesat, setiap bank termasuk bank syariah menawarkan berbagai produknya dengan banyak memberikan kemudahan dan manfaat bagi nasabahnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri, yaitu dengan mengembangkan produk *financial transaction card* (kartu pembayaran transaksi). Penggunaan teknologi modern sebagai instrumen pembayaran *non-cash*, baik secara domestik maupun secara internasional, telah berkembang pesat disertai dengan berbagai inovasi yang mengarah pada penggunaannya yang semakin efisien, aman, nyaman dan cepat.<sup>12</sup>

Dampak perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran tersebut terakhir ini adalah dengan munculnya instrumen pembayaran yang dikenal dengan istilah uang elektronik

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 10.

<sup>11</sup> Muhammad, op.cit, hal. 83

<sup>12</sup> Burhanuddin Abdullah, *Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, 2006), hal. 9

(*elektronic money*). Uang elektronik muncul sebagai jawaban atas kebutuhan terhadap instrument pembayaran mikro yang diharapkan mampu melakukan proses pembayaran secara cepat dengan biaya yang relatif murah, karena nilai uang yang disimpan instrument ini dapat ditempatkan pada suatu media tertentu yang dapat diakses dengan cepat secara *off-line*, aman dan murah.<sup>13</sup>

Kartu *BSM e-money* adalah kartu prabayar multifungsi yang diterbitkan oleh Bank Mandiri bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri sebagai pengganti uang tunai untuk transaksi pembayaran di merchant yang telah bekerjasama, dengan fitur sebagai berikut:

1. Saldo tersimpan pada *chip* kartu sehingga pada saat transaksi tidak dibutuhkan PIN atau tanda tangan.
2. Dapat diisi ulang (*top up*).
3. Dapat dimiliki nasabah maupun non-nasabah Bank Syariah Mandiri.
4. Dapat dipindah tangankan
5. Saldo mengendap pada kartu tidak diberikan bunga
6. Maksimal saldo Rp 1.000.000,- (sesuai ketentuan Bank Indonesia).
7. Dapat digunakan untuk pembayaran tagihan rutin (khusus di gerai Indomaret), seperti: PLN, Telkom, Indovision, First Media dan Oto Multi Artha.<sup>14</sup>

Implementasi uang elektronik dalam penyelenggaraanya melibatkan beberapa pihak, diantaranya adalah : 1) Penerbit; 2) Acquirer; 3) Pemegang kartu uang elektronik; 4) Pedagang (*merchant*). Kartu perdana *BSM e-money* dapat diperoleh dengan sangat mudah, karena calon pemegang kartu BSM e-money tidak harus mengisi identitas diri pada penerbit kartu *BSM e-*

---

<sup>13</sup>Tim Inisiatif, *Working Paper: Upaya Meningkatkan Pengguna Alat Pembayaran Non-Tunai*, (Jakarta: BI, 2006), hal. 8.

<sup>14</sup> Buku Panduan Elektronik Money, tth 1-2.

*Money*, dalam hal ini adalah Bank Syariah Mandiri. Calon Pemegang kartu *BSM e-money* dapat membeli kartu *BSM e-money* seharga Rp 20.000,- per kartu perdana di Bank Syariah Mandiri.

Biaya isi ulang/*Top-up BSM e-money* dengan menggunakan fasilitas *BSM Card* adalah:

- a. Di ATM Mandiri: Rp 2.000 (dua ribu rupiah) per satu kali isi ulang
- b. Di EDC Mandiri: Rp 6.500 (enam ribu lima ratus rupiah) per satu kali isi ulang.<sup>15</sup>

Cara bertansaksi menggunakan kartu *BSM e-money*, yaitu:

- 1) Pastikan *merchant* dapat menerima *BSM e-money*.
- 2) Pastikan saldo *BSM e-money* anda mencukupi untuk bertransaksi.
- 3) Pemegang kartu menyerahkan *BSM e-money* kepada kasir *merchant/tol*.
- 4) Kasir *merchant/tol* memasukan nominal yang harus dibayar dan menyentuhkan *BSM e-money* pada reader. Saldo pada *BSM e-money* akan berkurang sesuai nominal pembayaran.
- 5) Kasir *merchant/tol* menyerahkan kembali *BSM e-money* dan struk bukti pembayaran kepada Pemegang Kartu.
- 6) Khusus untuk transaksi pembayaran tol di Gardu Tol Otomatis (GTO), Pemegang kartu cukup menempelkan kartu pada mesin yang tersedia, saldo pada *BSM e-money* akan berkurang sesuai tariff tol yang berlaku dan palang gardu akan terbuka secara otomatis.
- 7) Khusus untuk transaksi pembayaran tol menggunakan *e-Tollpass*, Pemegang kartu cukup memasukan *BSM e-money* pada *e-Tollpass* yang dipasang dalam mobil, lalui gardu bertanda *e-Tollpass* dengan kecepatan maksimum 10km/jam, transaksi berhasil ditandai dengan bunyi “bip” sebanyak 2x pada *e-Tollpass*, saldo pada kartu anda akan berkurang sesuai tarif tol yang berlaku dan palang gardu akan terbuka secara otomatis.<sup>16</sup> Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Uang Elektronik 11/12/PBI/2009 dengan surat edaran nomor 11/11 dan PBI

---

<sup>15</sup> [www.syariahamandiri.co.id/category/bsm-e-money/](http://www.syariahamandiri.co.id/category/bsm-e-money/), diakses pada tanggal 9 April 2016 pada pukul 16.35 WIB

<sup>16</sup> Buku Panduan *BSM e-Money*, Tth: 8-9)

No.II/U/PBI/ 2009 tentang Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). Akan tetapi, sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada ketentuan pasal 1 ayat 12 yang menyatakan bahwa bank syariah harus menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam. Gambaran hukum Islam mengenai prinsip-prinsip keuangan syari'ah tercakup dalam bentuk kontrak (aqad) dan bentuk instrument keuangan. Aqad adalah ikatan kontrak dua pihak yang bersepakat.

<sup>17</sup>Namun dalam *BSM e-money* tidak adanya penjelasan kepada calon pengguna kartu *BSM e-money* mengenai akad yang digunakan.

Uang elektronik dipersamakan dengan uang, dalam transaksi uang elektronik *BSM e-Money* menggunakan akad *wakalah bil ujah* karena dalam proses transaksinya terdapat pelayanan jasa dan/atau sewa yang dilakukan oleh penyelenggara uang elektronik. Serta dalam proses penerbitan, penerbit bekerjasama dengan pedagang (*merchant*) dan/atau pihak lain sebagai agen penerbit.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan temuan di lapangan mengenai tidak adanya akad yang digunakan dalam produk *BSM e-money*. Namun dalam pelaksanaannya adanya penetapan jasa dalam penerbitan dan pengisian *BSM e-money* dan adanya perwakilan transaksi seperti pengisian di ATM Mandiri, maka berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses dan cara kerja *BSM e-Money* di Bank Syariah Mandiri KC Kopo Bandung?

---

<sup>17</sup>Muhammad, op. cit. hal. 85

2. Bagaimana mekanisme akad wakalah bil ujah dalam transaksi *BSM e-Money* di Bank Syariah Mandiri KC Kopo Bandung?
3. Bagaimana kesesuaian *BSM e-Money* di Bank Syariah Mandiri KC Kopo Bandung dengan PBI No.11/12/PBI/2009 dan PBI No.16/8/PBI/2014 tentang uang elektronik?

### C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah di atas dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Mengetahui proses dan cara kerja *BSM e-money* di Bank Syariah Mandiri KC Kopo Bandung.
2. Mengetahui mekanisme akad wakalah bil ujah dalam transaksi *BSM e-money* di Bank Syariah Mandiri KC Kopo Bandung.
3. Mengetahui kesesuaian *BSM e-Money* di Bank Mandiri Syariah KC Kopo Bandung dengan PBI No.11/12/PBI/2009 dan PBI No.16/8/PBI/2014 tentang uang elektronik.

### D. Kerangka Pemikiran

Dalam ibadah, kaidah hukum yang berlaku adalah bahwa semua hal dilarang, kecuali yang ada ketentuannya berdasarkan Alquran dan Al-Hadis. Sedangkan dalam urusan muamalah, semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.<sup>18</sup> Hal ini sesuai dengan kaidah yang dikutip oleh A. Djazuli yang menyatakan bahwa:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَكُنْ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

---

<sup>18</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hal. 29.

*“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”*<sup>19</sup>

Penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah disebabkan faktor-faktor sebagai berikut. Haram zatnya (*haram li-dzatihi*), haram selain zatnya (*haram lighairi*), tidak sah (lengkap) akadnya.

Haram zatnya yaitu transaksi dilarang karena objek (barang dan/atau jasa) yang ditransaksikan juga dilarang, misalnya minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Jadi, transaksi jual-beli minuman keras adalah haram, walaupun akad jual-belinya sah.<sup>20</sup>

Haram Selain Zatnya di bagi menjadi dua bagian yaitu melanggar prinsip “*an taradin minkum*” dan melanggar prinsip “*la tazhlimuna wa la tuzhlamun*”

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu) karena terdapat kondisi yang bersifat *unknown to one party* (keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini disebut juga *assymetric informasi*). *Unknown to one party* dalam bahasa fiqhnya disebut *tadlis*, dan dapat terjadi dalam empat hal, yakni dalam, kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.<sup>21</sup>

Prinsip kedua yang tidak boleh dilanggar adalah prinsip *la tazhlimuna wa la tuzhlamun*, yakni jangan menzalimi dan jangan dizalimi. Praktik-praktik yang melanggar prinsip ini

---

<sup>19</sup> A Djajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah hukum Islam dalam Menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 130.

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *Ibid.* hal. 31.



diantaranya,<sup>22</sup> *taghrir (gharar)*, rekayasa pasar dalam *Supply (Ikhtikar)*, rekayasa pasar dalam demand (*Bai' Najasy*), *riba*, *maysir*, *risywah*

*Gharar* atau disebut juga *taghrir* adalah situasi di mana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainty to both parties* (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi).<sup>23</sup>

Rekayasa pasar dalam *supply* terjadi bila seorang produsen/ penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi supply agar harga produk yang dijualnya naik, biasanya dilakukan dengan membuat *entry barrier*, yakni menghambat produsen/ penjual lain masuk ke pasar, agar ia menjadi pemain tunggal di pasar (monopoli).

Rekayasa pasar dalam *demand* terjadi bila seorang produsen (pembeli) menciptakan permintaan palsu, seolah-olah banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik.

*Riba*, terdapat tiga jenis yaitu *riba fadl* (*riba* yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memiliki kriteria sama kualitasnya), *riba nasi'ah* (timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung bersama resiko), *riba jahiliyah* (utang yang dibayar melebihi dari pokok).

*Maysir* atau perjudian adalah suatu permainan yang menetapkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut.<sup>24</sup>

*Risywah* adalah memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai tindakan *risywah* (suap-menyuap) jika dilakukan kedua belah pihak secara sukarela. Jika hanya satu pihak yang meminta suap dan

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 32.

<sup>23</sup> *Ibid*.

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 43.



pihak lain tidak rela atau dalam keadaan terpaksa atau hanya memperoleh haknya, peristiwa tersebut bukan termasuk kategori risiwa, melainkan tindak pemerasan.<sup>25</sup>

Prinsip ketiga tidak sah (lengkap) akadnya, yaitu suatu transaksi yang tidak termasuk dalam kategori *haram li dzatihi* maupun *haram li ghairihi*, belum tentu serta merta menjadi halal. Masih ada kemungkinan transaksi tersebut menjadi haram bila akad atas transaksi itu tidak sah atau tidak lengkap. Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah dan/atau tidak lengkap akadnya, bila terjadi salah satu (atau lebih) faktor-faktor berikut ini, yaitu rukun dan syarat tidak terpenuhi, terjadi *ta'alluq* dan terjadi "*two in one*"

Rukun adalah sesuatu yang wajib dalam suatu transaksi (*necessary condition*). Pada umumnya rukun *muamalah iqtishadiyah* (muamalah dalam bidang ekonomi) ada tiga, yaitu pelaku, objek, ijab-kabul<sup>26</sup>

*Ta'aluq* terjadi bila kita dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan, masa berlakunya akad satu tergantung akad dua.<sup>27</sup>

*Two in one* adalah kondisi di mana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian (*gharar*) mengenai akad mana yang digunakan (berlaku). Dalam terminologi fiqh, kejadian ini dengan *shafqatain fi al-shafqah*. *Two in one* terjadi bila semua dari ketiga faktor terpenuhi, yaitu objek sama, pelaku sama dan jangka waktu sama.<sup>28</sup>

Fiqh muamalah membedakan antara *wa'ad* dengan akad. *Wa'ad* adalah janji antara suatu pihak kepada pihak lainnya, sementara akad adalah kontrak antara dua belah pihak.<sup>29</sup> Fiqh muamalah membagi akad menjadi dua bagian, yakni akad *tabarru* dan akad *tijarah/ mu'awadah*.

#### Akad

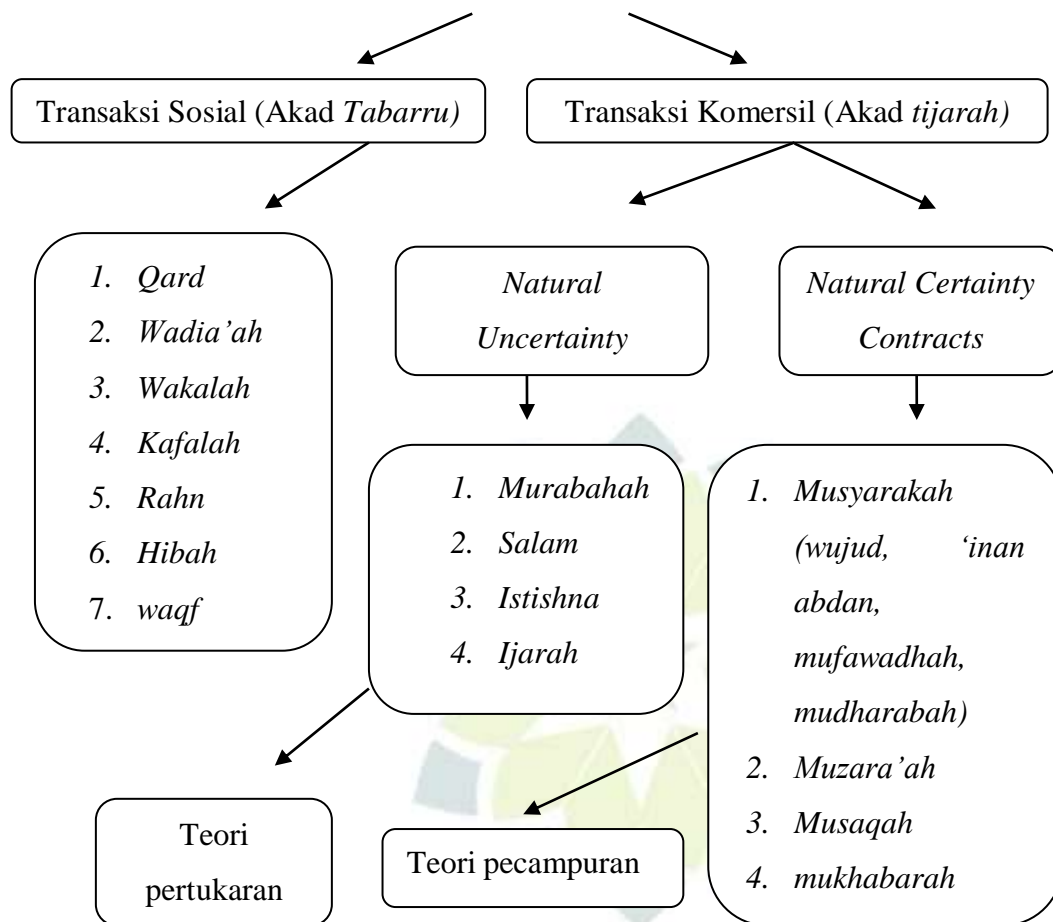
<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 45.

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 46.

<sup>27</sup> *Ibid*, hal 48.

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 49.

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 65.



Gambar 1.1 Pembagian Akad

Sumber : Adiwarman A. Karim

Akad *Tabarru* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan.<sup>30</sup> Yang termasuk dalam akad *tabarru'*, yaitu *qard*, *rahn*, *hiwalah*, *wakalah*, *wadi'ah*, *kafalah*, *hibah*, *waqf* dan *shadaqah*.

Akad *Tijarah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil.

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 66.

Berdasarkan dari tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad *tijarah* dibagi menjadi dua kelompok besar, yakni: *natural certainty contract* dan *natural uncertainty contract*.<sup>31</sup>

Dalam *natural certainty contract*, kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, karena objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan diawal akad dengan pasti, baik jumlahnya (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*) dan waktu penyerahannya (*time of delivery*). Jadi, kontrak-kontrak ini secara “*sunnatullah*” (*by their nature*) menawarkan return yang tetap dan pasti. Kontrak-kontrak yang termasuk dalam kategori ini, yaitu akad jual beli (*al bai'*, *salam*, *isthisna*) dan akad sewa-menyewa (*ijarah* dan *IMBT*). Dalam akad-akad tersebut, pihak-pihak yang bertransaksi saling mempertukarkan asetnya (baik *real asset* maupun *financial asset*).<sup>32</sup>

Dalam *natural uncertainty contract*, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrak investasi ini secara “*sunnatullah*” (*by their nature*) tidak menawarkan return yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya tidak *fixed and predetermined*. Contoh-contoh *natural uncertainty contract*, yaitu musyarakah (*wujuh*, ‘*inan*, *abdan*, *mufawadhah*, *mudharabah*), *muzara'ah*, *musaqah* dan *mukhabarah*.<sup>33</sup>

Akad dapat dikelompokkan pula berdasarkan unsurnya menjadi akad *basith* dan akad *murakkabah*. Yang pertama bisa disebut dengan akad tunggal, yaitu sebuah akad yang didalamnya tidak ada akad lain, seperti dalam produk tabungan memakai akad *wadi'ah* atau *mudharabah*. Sedangkan yang kedua merupakan akad yang mengandung beberapa akad yang

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 70.

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 72.

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 75.

tidak dapat dipisah-pisahkan atau disebut dengan multi akad,<sup>34</sup> seperti dalam produk kartu kredit, dimana di dalamnya mengandung beberapa akad, akad *kafalah*, akad *ijarah* dan akad *qardh*. Akad-akad yang ada di dalam transaksi kartu kredit ini tidak lagi berdiri sendiri, melainkan melebur menjadi satu, yaitu transaksi kartu kredit (*bithaqah i'timaniyah*), tidak lagi disebut akad *kafalah* atau *ijarah*.<sup>35</sup>

## E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian ini merupakan salah satu unsur yang sangat diperlukan dalam suatu penelitian. Mengingat betapa pentingnya langkah-langkah tersebut, maka didalam penelitian ini penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif. Menurut Nana Syaodih Sukamadinata, penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang ditunjukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya.<sup>36</sup>

Adapun pemilihan metode penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa metode ini dinilai mampu menjawab pertanyaan yang menyangkut suatu permasalahan sehingga dapat menggali fenomena empiric yang terjadi dan memaparkan analisis dengan mengimplementasikan data-data dalam pengamatan langsung mengenai pelaksanaan akad *sharf*, *ijarah* dan *wakalah* pada produk BSM *E-Money* di Bank Syariah Mandiri KC Kopo.

### 2. Jenis Data

---

<sup>34</sup> Hasanudin, Disertasi Konsep dan Standar Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), hal. 47.

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 51

<sup>36</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya; 2007), hal.72

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Yakni data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang tidak berupa hitungan atau angka, yang mana data ini adalah data yang sesuai dengan rumusan masalah tentang pelaksanaan akad sharf, ijarah dan wakalah pada *BSM e-money* beserta prosedurnya.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang menjadi rujukan dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa wawancara, observasi. Data tersebut diperoleh dari dokumen resmi Bank Syariah Mandiri KC Kopo Bandung dan informasi, diantaranya:.

1) Ibu Fina Ratnawati sebagai *customer service* di Bank Syariah Mandiri KC Kopo Bandung.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang bukan diusahakan oleh peneliti. Yakni sumber data penunjang yang diperoleh dari berbagai referensi baik berupa buku-buku, dokumen-dokumen maupun berbagai literatur lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian yang diteliti.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara adalah Tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber.<sup>37</sup> Wawancara yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan secara objektif dilakukan dengan ibu Fina Ratnawati selaku bagian Customer Service di Bank Syariah Mandiri KC Kopo Bandung pada tanggal 21 Maret 2016.

#### b. Observasi

Observasi adalah bentuk pengamatan langsung kepada suatu objek yang akan diteliti.<sup>38</sup> Yaitu pengamatan langsung yang dilakukan peneliti guna memperoleh data dengan memperhatikan kondisi dan fenomena objek penelitian yakni pelaksanaan akad sharf, ijarah, dan wakalah pada *BSM e-money* di Bank Syariah Mandiri KC Kopo Bandung.

#### c. Dokumentasi

Istilah berasal dari kata dokumen, artinya barang-barang tertulis.<sup>39</sup> Di dalam pelaksanaan penelitian, peneliti menyelidiki benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen (naskah), dan seterusnya.<sup>40</sup> Jenis teknik pengumpulan data dokumentasi ini dilakukan peneliti dengan cara:

- 1) Mengumpulkan sumber-sumber data tertulis atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini;
- 2) Melakukan penelaahan terhadap hasil bacaan yang berkaitan dengan penelitian dan objek yang akan diteliti; dan
- 3) Menggolongkan atau mengkatagorikan teori-teori dari sumber-sumber tersebut yang berkaitan dengan objek atau masalah yang diteliti.

---

<sup>37</sup> Islachuddin Yahya, *Teknik Penulisan karangan Ilmiah*, (Surabaya: Surya Jaya Raya;2008), hal. 72.

<sup>38</sup> *Ibid*, hal. 73.

<sup>39</sup> *Ibid*, hal. 74

<sup>40</sup> *Ibid*.

## 5. Analisis Data

Analisi data atau pengolahan data, yaitu upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dokumentasi, angket dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi yang lain.<sup>41</sup> Setelah data-data yang dibutuhkan telah diperoleh, kemudian dilakukan telaah dan analisis terhadap data tersebut baik berupa data primer maupun data sekunder. Dalam melakukan analisa data ini penelitian melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Perencanaan, yaitu perencanaan penelitian meliputi perumusan dan pembatasan masalah kemudian merumuskannya dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian;
- b. Memulai pengumpulan data, peneliti memulai wawancara dengan informan yang telah dipilih.<sup>42</sup> Data yang diperoleh dari wawancara kemudian dilengkapi dengan data pengamatan dan data dokumen baik berupa data primer maupun data sekunder;
- c. Melengkapi, yaitu menganalisis data menyusunnya dari fakta-fakta hasil temuan lapangan;
- d. Menghubungkan semua data dengan teori-teori yang sudah dipaparkan pada bagian kerangka pemikiran;
- e. Menyimpulkan.

---

<sup>41</sup> Islachudin Yahya, *op.cit*, lah. 74.

<sup>42</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *loc.cit*, lah. 114